

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI DI KABUPATEN LABUHAN BATU**

TESIS

OLEH

**ASROL AZIZ LUBIS
NPM. 181801081**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN LABUHAN BATU

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

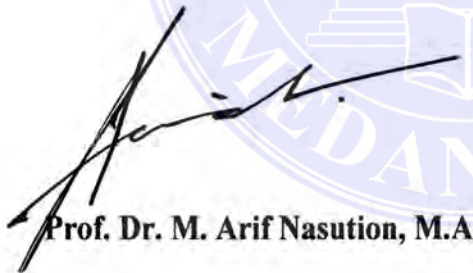
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Peran Dinas Sosial dalam Mengatasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Labuhan Batu
Nama : Asrol Aziz Lubis
NPM : 181801081

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. M. Arif Nasution, M.A



Dr. Warjio, MA

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**

Direktur

Dr. Abdul Kadir, M.Si

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access from (repository.uma.ac.id)25/8/23

Telah diuji pada Tanggal 12 November 2020

Nama : Asrol Aziz Lubis

NPM : 181801081



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Abdul Kadir, M.Si

Sekretaris : Dr. Nina Salmaniah Siregar, M.Si

Pembimbing I : Prof. Dr. M. Arif Nasution, M.A

Pembimbing II : Dr. Warjio, MA

Penguji Tamu : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access from (repository.uma.ac.id)25/8/23

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 12 November 2020

Yang menyatakan,



Asrol Aziz Lubis

ABSTRAK

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KABUPATEN LABUHAN BATU

Oleh :

Nama : Asrol Aziz Lubis
NPM : 181801081
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Pembimbing II : Dr. Warjio, MA

Peran Dinas Sosial sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan, melalui program-program yang telah di buat oleh Dinas Sosial bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada, dan memberikan pelayanan yang optimal adalah kewajiban pemerintah agar permasalahan kemiskinan tersebut dapat berkurang.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Labuhan Batu penelitian ini khususnya pada peran dinas sosial dengan tujuan adalah untuk menganalisa peran dinas sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Labuhan Batu.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *random sampling* karena responden yang dijadikan sampel besar. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 49 orang yang merupakan masyarakat atau keluarga miskin di Beberapa Kecamatan di Labuhan Batu.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah *Obsevasi*, *Interview* (wawancara) . Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisa dengan analisis kualitatif, yaitu memberikan prediket pada variable yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peran Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di kabupaten Labuhan Batu ternyata belum efektif (belum baik) dan belum maksimal dikarenakan data yang lama masih belum berubah yang diukur dari tujuan indikator peran dinas sosial.

Kata Kunci: Peran, Dinas Sosial, Rumah tidak Layak Huni

ABSTRACT

The Role of Social Services in Overcoming the Unfit for Habitation Labuhan Batu District

By:

Name : *Asrol Aziz Lubis*
NPM : *181801081*
Study Program : *Master of Science Public Administration*
Supervisor I : *Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA*
Supervisor II : *Dr. Warjio, MA*

The role of the Social Service is very important in alleviating poverty, through the programs that have been made by the Social Service aimed at reducing the existing poverty rate, and providing optimal services is the government's obligation so that the poverty problem can be reduced.

This research was conducted in Labuhan Batu Regency. This research, especially on the role of social services, with the aim of analyzing the role of social services in reducing poverty in Labuhan Batu Regency.

Sampling in this study using a random sampling technique because the respondents who made the large sample.

The number of samples in this study were 49 people who were poor people or families in several districts in Labuhan Batu. The data collection techniques in this research were observation, interview (interview).

Types and sources of data used are primary data and secondary data. The data were analyzed by means of qualitative analysis, which is to provide predictions for the variables under study in accordance with the actual conditions.

The conclusion of this study is that the role of the Social Service in overcoming the poverty rate in Labuhan Batu district has not been effective (not good) and has not been maximized because the old data has not changed as measured by the objective of the indicators of the role of social services.

Keywords : *Role, Social Service, Unfit for Habitation*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunianya sehingga penulis masih dapat mengikuti dan menyelesaikan pengerjaan Tesis ini dengan judul **”Peran Dinas Sosial dalam Mengatasi Rumah tidak Layak Huni di Kabupaten Labuhan Batu”**.

Lembaga yang menangani masalah Kemiskinan di Kabupaten Labuhan Batu adalah Dinas Sosial yang memiliki peranan penting dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu di Kabupaten Labuhan Batu. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas sosial Kabupaten Labuhan Batu sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal.

Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Labuhan Batu. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Februari 2020
Penulis

ASROL AZIZ LUBIS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access Profile (repository.uma.ac.id)25/8/23

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan segala rahmat dan karunianya akhirnya pembuatan Tesis ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Yang telah membimbing kita dari Zaman jahiliyah ke zaman imaniyah ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc. Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna A Kuswardhani, MS. Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Isnaini SH, M.Hum, Wakil Direktur Bidang Akademik Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Abdul Kadir, M.Si Ketua Prodi Magister Ilmu Administrasi publik Universitas Medan Area.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA sebagai Dosen Pembimbing Pertama yang mengarahkan dan memberikan masukan dalam penelitian ini.
6. Bapak Dr. Warjio MA. Sebagai Dosen Pembimbing kedua Memberi Masukan dan selalu Mendukung Dalam Penelitian ini.
7. Para Dosen-Dosen Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik yang telah memberikan Ilmu-Ilmu serta Bimbingannya.
8. Staff Tata Usaha Program Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access Profile (repository.uma.ac.id)25/8/23

Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan pelayanan terbaiknya kepada Mahasiswa.

9. Kepada kedua orangtuaku yang telah memberikan dukungan dan doanya.
10. Serta kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penelitian ini.
11. Kepada semua pihak yang telah bersedia menjadi informan penelitian ini.

Pembuatan Tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari kekurangan, maka dihimbau kepada pembaca untuk memberikan saran penyempurnaan.

Ucapan terima kasih tidak lupa disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, memotivasi, dan mengilhami usaha pembuatan Tesis ini. Semoga Tesis ini bermanfaat.

Februari 2020

Penulis

ASROL AZIZ LUBIS
NPM : 1818010381

DAFTAR ISI

| | halaman |
|---|-----------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| UCAPAN TERIMA KASIH | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 19 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 19 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 20 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 20 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 22 |
| 2.1 Pengertian Peranan | 22 |
| 2.2 Peranan Dinas Sosial | 23 |
| 2.3 Teori Kemiskinan | 25 |
| 2.4 Perda Kabupaten Labuhan Batu tentang penanggulangan angka kemiskinan | 32 |
| 2.5 Konsep Operasional | 34 |
| BAB III METODELOGI PENELITIAN | 37 |
| 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian..... | 37 |
| 3.2 Data Yang Diperlukan | 37 |
| 3.3 Teknik Pengumpulan Data | 38 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM | 41 |
| 4.1 Profil Kabupaten Labuhan Batu | 41 |
| 4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Labuhanbatu | 41 |
| 4.1.2. Letak dan Batas Wilayah Kabupaten Labuhanbatu | 42 |

| | |
|--|------------|
| 4.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Labuhan Batu | 43 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 51 |
| 5.1 Peran atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Labuhan Batu | 51 |
| 5.1.1 Kendala-kendala yang di hadapi oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan di kabupaten Labuhan Batu | 52 |
| 5.2 Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Angka Kemiskinan | 53 |
| 5.2.1 Pelayanan Dinas Sosial Terhadap Keluarga Miskin | 54 |
| 5.2.2 Bantuan Perbaikan Perumahan | 55 |
| 5.2.3 Beberapa Peraturan Teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni | 55 |
| 5.2.4 Perencanaan | 86 |
| 5.2.5 Pendataan | 89 |
| 5.2.6 Pemberian Bantuan | 94 |
| BAB VI PENUTUP | 109 |
| 6.1 Kesimpulan | 109 |
| 6.2 Saran | 110 |
| DAFTAR PUSTAKA | 112 |
| LAMPIRAN..... | 114 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang masalah kemiskinan atau Fakir Miskin, maka isu-isu pembahasan lingkungan sosial tidak bisa dipisahkan, karena masyarakat atau individu yang ada dalam lingkungan sosial adalah satu kesatuan dimana masyarakat hidup atau berinteraksi dalam lingkungan sosial. Hal ini sejalan dengan berbagai literatur dimana lingkungan sosial, konteks sosial, konteks sosiokultural, adalah sesuatu hal yang didefinisikan sebagai suasana fisik atau suasana sosial dimana manusia hidup didalamnya, atau dimana sesuatu terjadi dan berkembang. Lingkungan sosial tersebut bisa berupa kebudayaan atau kultur yang diajarkan atau dialami oleh seorang individu, atau juga manusia dan institusi yang berinteraksi dengan individu tersebut (Barnett dan Casper, 2001: 91).

Salah satu aspek yang mendukung tumbuhnya lingkungan sosial yang sehat dalam masyarakat adalah terpenuhinya tempat tinggal yang layak huni yang didukung dengan ketersediaan sarana lingkungan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan interaksi sosial dengan baik. Pada umumnya kelompok masyarakat miskin khususnya Fakir Miskin memiliki rumah atau tempat tinggal yang kurang layak huni dan dilingkungannya memiliki keterbatasan sarana lingkungan yang mendukung kurangnya kesehatan lingkungan seperti, tidak adanya tempat pembuangan sampah, aliran got atau limbah rumah tangga tidak berjalan baik, atau juga jalanan menuju rumah rusak, dan lain-lain. Kondisi ini sejalan dengan masuknya kriteria rumah yang tidak

layak huni menjadi indikator masalah kemiskinan. Jika merujuk pada Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyebutkan fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan dan di Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang menyatakan bahwa salah satu bentuk penanganan Fakir Miskin adalah penyediaan pelayanan perumahan.

Oleh karena itu dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa negara harus hadir dalam memberikan atau memfasilitasi bagi setiap warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak huni. Hal ini sangat penting, karena setiap individu dan keluarga membutuhkan rumah. Rumah memiliki fungsi yang mencakup aspek fisik (aman), mental (nyaman), dan sosial (dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga dan menjadi media yang baik bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga). Oleh karenanya, apabila kebutuhan rumah tinggal layak huni dapat terpenuhi, maka akan berpengaruh terhadap ketahanan keluarga. Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Selain rumah, tidak kalah penting adalah ketersediaan dan kualitas Sarling di permukiman. Idealnya rumah dan Sarling memenuhi syarat sebagai permukiman yang sehat, yang mengacu pada “hak asasi permukiman” (*Habitat bill of right*). Lingkungan permukiman yang sehat, baik secara fisik, psikis, sosial, dan spiritual.

1. Merujuk pada Bagian Kelima Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, disebutkan bahwa penanganan Fakir Miskin yang diselenggarakan Menteri yang memiliki tugas di bidang

urusan sosial adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan pengembangan potensi diri, sandang, pangan, perumahan, dan pelayanan sosial. Untuk melaksanakan pemenuhan hak Fakir Miskin guna memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, perlu memberikan Bantuan Sosial kepada Fakir Miskin melalui kegiatan rehabilitasi sosial Rutilahu dan/atau Sarling. Sejalan dengan pemberian Bantuan Sosial ini telah ditetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

- 2 Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, menetapkan kebijakan dan program penanganan Fakir Miskin dengan menetapkan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling. Dalam implementasi kegiatan tersebut, oleh Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualitas lingkungan sosial melalui Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bagi Fakir Miskin.
- 3 Untuk menyamakan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling di Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin maka perlu menyusun Peraturan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling.

Kemiskinan merupakan suatu persoalan masyarakat yang sangat mendasar.

Karena di satu sisi menentukan tingkat perkembangan suatu masyarakat dan di

sisi lain menjadi salah satu indikator tidak berhasilnya proses pembangunan. Kemiskinan juga menjadi tanda dari perkembangan ekonomi pasar yang timpang dan kemunduran berbagai institusi sosial di dalam memecahkan persoalan penduduk. Masalah kemiskinan terus menjadi persoalan masyarakat dan negara di dunia ini dari masa ke masa. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memerangi kemiskinan, bahkan di Tingkat International telah dideklarasikan dalam sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang di ikuti oleh 189 negara anggota PBB pada bulan September 2000. Deklarasi ini menghimpun komitmen para pemimpin dunia untuk menyepakati dokumen yang disebut dengan Tujuan Pembangunan Millinium atau Millenium Development Goals (MDG's). Delapan agenda yang ingin dicapai dalam MDGs antara lain :

- (1) penanggulangan kemiskinan absolut dan kelaparan yang ingin dicapai pada 2015;
- (2) pencapaian pendidikan dasar bagi semua anak laki-laki dan perempuan yang ingin dicapai pada tahun 2015;
- (3) pemberdayaan kesederajatan gender dan perempuan;
- (4) pengurangan tingkat kematian anak;
- (5) peningkatan kesehatan ibu;
- (6) pemberantasan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
- (7) menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menghentikan perusakan lingkungan serta mendorong pembangunan berkelanjutan;
- (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Nurhadi, 2007:72).

Sementara bagi Indonesia persoalan kemiskinan menjadi satu persoalan tersendiri yang dari tahun ke tahun tidak pernah terselesaikan dengan berbagai kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia, dan diperlukan suatu strategi yang terpadu. Hal ini karena persoalan kemiskinan lebih bersifat multi dimensi dari pada persoalan lainnya yang dihadapi oleh bangsa ini. Usaha memerangi kemiskinan sebenarnya tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Pemerintah juga terus berupaya menekan angka kemiskinan dengan program penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor kehidupan.

Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya. Seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran

Kemiskinan menjadi salah satu ukuran terpenting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan di suatu wilayah lazim digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Dengan demikian, kemiskinan menjadi salah

satu tema utama pembangunan. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan acap kali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan (**Suryahadi dan Sumarto, 2001**).

Kemiskinan terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan (**Soegijoko, 1997:137**).

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang ditandai dengan pengangguran, keterbelakangan, dan keterpurukkan. Masyarakat miskin lemah dalam kemampuan berusaha dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi (Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propenas).

Permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Menurut **Remi dan Tjiptoherijanto (2002:1)** upaya menurunkan tingkat kemiskinan telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi upaya tersebut mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah orang miskin pada awal 1990-an kembali naik. Disamping itu kecenderungan ketidakmerataan pendapatan melebar yang mencakup antar sektor, antar kelompok, dan ketidak merataan antar wilayah.

Pada dekade 1990-an pemerintah memunculkan kembali program pengentasan kemiskinan, diantaranya Program Inpres Desa Tertinggal (IDT),

Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra) dan Kredit Keluarga Sejahtera (Kukesra). Adanya program-program tersebut dan program pembangunan lainnya secara perlahan-lahan mampu menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi dengan timbulnya krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997, telah menyebabkan bertambahnya penduduk miskin.

Akibat krisis ekonomi yang terus berkelanjutan, sampai dengan akhir tahun 1998 jumlah penduduk miskin telah menjadi 49,5 juta jiwa atau sekitar 24,2 % dari jumlah penduduk Indonesia. Perlu dicatat bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut tidak sepenuhnya terjadi akibat krisis ekonomi, tetapi juga dikarenakan perubahan standar yang digunakan (BPS, 2003:575). Jumlah penduduk yang meningkat tersebut terutama disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Dalam kondisi krisis, kenaikan harga-harga yang tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan nominal menyebabkan garis kemiskinan bergeser ke atas sehingga penduduk yang semula tidak termasuk miskin menjadi miskin (UU No. 25 Tahun 2000 tentang Proenas).

Timbulnya krisis ekonomi tersebut, maka pemerintah melaksanakan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk menutupi penurunan daya beli mayoritas penduduk. Aktivitas program ini: 1) Program keamanan pangan dalam bentuk penyediaan beras murah untuk keluarga miskin; 2) Program pendidikan dan perlindungan sosial; 3) Program kesehatan melalui aktivitas memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin; 4) Program padat karya untuk

mempertahankan daya beli rumah tangga miskin (Remi dan Tjiptoherijanto, 2002:29-30) Upaya tersebut dilanjutkan dengan meluncurkan program Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM/DKE) pada akhir tahun 1998 berupa pemberian dana langsung kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Berikutnya pemerintah juga melaksanakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan sasaran perdesaan dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dengan sasaran perkotaan. Sebagai kelanjutan Program JPS, pemerintah melaksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) yang dilaksanakan diantaranya pada bidang pangan, kesehatan, pendidikan, prasarana dan sebagainya.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan yang semakin baik telah menjadikan Kabupaten Labuhanbatu sebagai daerah yang berpotensi bagi perkembangan sektor industri, perdagangan dan pariwisata. Hal ini merupakan daya tarik bagi penduduk daerah lain untuk datang ke Kabupaten Labuhan Batu, baik dengan tujuan bisnis, wisata, maupun untuk mencari pekerjaan, tentunya hal ini membawa dampak yang sangat besar bagi dinamika kehidupan sosial masyarakat, karena dengan perkembangan sektor tersebut di atas dapat mendorong berkembangnya permasalahan-permasalahan sosial yang semakin kompleks, seperti gelandangan, pengemis, pengangguran, lanjut usia terlantar, anak-anak terlantar, kriminalitas, dan narkoba. Dan pokok permasalahan yang paling utama adalah pengaruhnya terhadap angka kemiskinan yang timbul di Kabupaten Labuhanbatu itu sendiri.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian didasarkan pada Peraturan Presiden RI No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu membuat Perda No. 02 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2016, dalam rangka membentuk Dinas Sosial (DINSOS) yang mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Sosial.

b. Fungsi

Dinas Sosial mempunyai fungsi melakukan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugas sosial; melakukan pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat di pahami bahwa Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Labuhanbatu dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Sosial yang antara lain dalam rangka menanggulangi angka kemiskinan.

peranan Dinas Sosial (DINSOS) dalam menjalankan pembangunan daerah yang diamanatkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu berupa peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di tingkat

Kabupaten Saja akan tetapi pada tingkat Kecamatan juga di perhatikan oleh pemerintah.

Selain dari itu, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Labuhanbatu juga melaksanakan peran sebagai pelaksana daerah dibidang Sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan berupaya untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan sosial dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun kompleksitasnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup.

Tugas atau Peran Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dalam menanggulangi angka kemiskinan, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pemberdayaan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Mengembangkan Peran Aktif Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
3. Memperluas Ketahanan Sosial Masyarakat.
4. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur yang berbasis Kesejahteraan Sosial.

Sehubungan dengan penugasan tersebut Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu telah melakukan usaha-usaha untuk menanggulangi angka kemiskinan yang timbul di daerah Kabupaten Labuhanbatu itu sendiri antara lain melalui serangkaian usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, meningkatkan peran dan kinerja Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM) dan Organisasi Profesi, Pemberdayaan Komunitas

Adat Terpencil (KAT), pendayagunaan sumber dana sosial serta terpenuhinya kebutuhan dasar para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kegiatan untuk meningkatkan peran Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial, pembinaan dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur sehingga memiliki wawasan dan penunjang dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ternyata masih kurang berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diketahui dari jumlah data kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2019

| No | Tahun | Jumlah Keluarga Miskin |
|----|-------|------------------------|
| 1. | 2014 | 31.721 KK |
| 2. | 2015 | 30.892 KK |
| 3. | 2016 | 31.887 KK |
| 4. | 2017 | 32.052 KK |
| 5. | 2018 | 32.660 KK |
| 6. | 2019 | 34.922 KK |

Sumber Data: BPS Kabupaten Labuhanbatu 2019

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu semakin meningkat sampai dengan tahun 2019. Hal ini berarti Pemerintah melalui Dinas atau Departemen yang menangani masalah kemiskinan belum berperan secara baik. Angka kemiskinan pada tingkat kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu yang ternyata masih belum

merata dalam rangka penanggulangan angka kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu secara merata sebagai mana pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Jumlah Keluarga Miskin Berdasarkan Kecamatan Di Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019.

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Keluarga Miskin |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Bilah Barat | 15.900 | 3.051 |
| 2. | Panai Hulu | 18.677 | 3.768 |
| 3. | Panai Hilir | 12.861 | 3.587 |
| 4. | Bilah Hulu | 10.660 | 3.377 |
| 5. | Bilah Hilir | 16.043 | 4.788 |
| 6. | Panai Tengah | 25.300 | 4.864 |
| 7. | Pangkalan | 8.440 | 1.971 |
| 8. | Rantau Selatan | 19.741 | 3.984 |
| 9. | Rantau Utara | 10.704 | 5.533 |
| Jumlah | | 172.882 | 34.922 |

Sumber Data: BPS Kabupaten Labuhanbatu 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka kemiskinan perkecamatan yang paling tinggi angka kemiskinannya yaitu Kecamatan Rantau Utara 5.533 KK. Berdasarkan data di atas bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu dilihat dari perkecamatannya masih cukup tinggi hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti mata pencaharian masyarakatnya yaitu bertani, dan nelayan tradisional, kemudian faktor lain yaitu Komunitas Adat terpencil (KAT) yang lebih banyak bertempat tinggal di sekitar pinggiran.

Kasus kemiskinan pada Kabupaten Labuhanbatu bukan merupakan kasus yang baru lagi, persoalan ini sudah menjadi persoalan yang mendasar di bahas

oleh negara begitu juga pemerintah daerah. Angka kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu memang tidak begitu berbeda jumlahnya tiap tahun karena hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, disinilah peran Dinas Sosial untuk membahas persoalan kemiskinan tersebut.

Kegiatan KUBE ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, yang mana di dalam undang-undang ini mengatur semua program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial yang ada, jadi sekarang ini kegiatan program KUBE ini bukanlah program baru yang di buat oleh pemerintah namun kegiatan ini sudah ada sejak lama akan tetapi dahulunya program ini tidaklah berjalan dengan baik nya sebagai mana semestinya.

Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan KUBE yang di lakukan dinas sosial yang mana bisa kita lihat pada penjelasan di bawah ini;

Yang pertama kita harus mengetahui apa pengertian dari KUBE itu sendiri:

KUBE adalah suatu kelompok yang di bentuk warga atau keluarga-keluarga binaan sosial yang terdiri dari orang-orang atau keluarga-keluarga yang kurang mampu atau (prasejahtera) yang menerima pelayanan sosial melalui kegiatan program pemberdayaan fakir miskin.

Program KUBE ini mempunyai sasaran yaitu pada masyarakat miskin atau pada desa tertinggal dengan tujuan sebagai berikut:

1. Terciptanya sumber pendapatan bagi penduduk miskin di desa, melalui usaha-usaha penciptaan lapangan kerja produktif.

2. berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat bersekala kecil dan menengah.
3. Meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan melalui peningkatan pendapatan.

Penerimaan Bantuan stimulan pemberdayaan nya adalah para keluarga binaan sosial yang tergabung dalam KUBE, namun kondisi usaha ekonomi produktifnya mengalami hambatan atau kegagalan dan memerlukan bantuan tambahan modal usaha.

Adapun kelompok yang di prioritaskan mendapatkan bantuan program stimulan adalah.

1. Kelompok penduduk atau petani miskin dan tidak cukup memiliki sumber penghasilan bagi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-sehari, khususnya untuk pengadaan pangan, pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan sosial ekonomi lainnya.
2. Kelompok wanita dan pemuda yang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan tetap.
3. Tidak sedang menjadi peserta atau penerima bantuan dari peroyek lain yang sedang berjalan.
4. Satu kepala keluarga (KK) hanya di benarkan ikut serta dalam satu paket kegiatan pada satu tahun anggaran.

Adapun Mekanisme pengembangan bantuan stimulan yang benar dalam penerapan dan pengelolaannya harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

TAHAP I:

Pengelolaan Usaha dan jenis usaha yang akan di buat atau yang di rencanakan (Contoh : Ternak Kambing). Bantuan stimulan berupa ternak yang diserahkan kepada masing-masing kelompok, merupakan milik kelompok, oleh karena itu pengelolaan dan pengembangannya menjadi tanggung jawab bersama. beberapa pilihan cara pengelolaan bantuan dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan kelompok antara lain: Pengelolaan Bantuan Secara **Kolektif**, yaitu: bantuan ternak kambing yang diterima dikelola secara bersama-sama oleh seluruh anggota kelompok dalam satu kandang dengan mengutamakan azas kebersamaan dengan cara mengadakan pembagian kerja secara adil dan merata. Di dalam kegiatan ini, tidak dibenarkan anggota Keluarga Binaan Sosial (KBS) diperlakukan sebagai buruh. Pengelolaan bantuan Secara **Perorangan**, yaitu: karena pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga bantuan stimulan tidak dapat dikelola secara kolektif (misalnya tempat tinggal saling berjauhan, lahan kosong yang terbatas untuk membuat kandang yang besar, dan lain-lain). maka bantuan stimulan dapat dikelola secara perorangan dengan catatan bahwa kegiatan tersebut masih terkait dengan kepemilikan kelompok, sehingga kepada yang bersangkutan (pengelola) tetap dikenakan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan kelompok.

TAHAP II: Pengguliran

Setiap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang mendapatkan bantuan diwajibkan melaksanakan pengguliran kepada warga lain yang membutuhkan disekitarnya baik secara perorangan maupun secara kelompok (KUBE) yang lain

akan di bentuk sesuai dengan jumlah dan besarnya ternak yang digulirkan sesuai dengan bantuan stimulan yang diterima adapun waktu pelaksanaan pengguliran ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara anggota kelompok dengan persatuan Pembinaan KUBE.

TAHAP III: Pembagian Hasil/Keuntungan

Pengelolaan bersama kelompok bertanggung jawab terhadap pembagian keuntungan atau kerugian yang diderita kelompok. Setiap keuntungan/kerugian wajib dilaporkan kepada seluruh anggota. Pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan kelompok atau didasarkan pada beban kerja dan tanggung jawab anggota. Sebaiknya pembagian keuntungan diatur sebagai berikut : Insentif bagi pengelola : 25 %, Dibagikan kepada anggota: 20 %, Pengguliran: 50 %, Untuk usaha kesejahteraan sosial (UKS): 5 %.

TAHAP IV: Pengumpulan dana IKS (Iuran Kesetiakawanan Sosial)

Setelah melaksanakan kewajiban menggulirkan, dari ternak yang dipelihara oleh KUBE maka anggota KUBE wajib menyisihkan sebagian keuntungan yang diperolehnya untuk tabungan kelompok atau Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS). Besarnya nilai IKS dan kapan mulai mengumpulkannya ditentukan berdasarkan kesepakatan kelompok dengan mempertimbangkan kondisi dan hasil usaha serta rasa kesetiakawanan sosial seluruh anggota kelompok. Dana IKS yang terkumpul dapat dipergunakan untuk : (Apabila sangat diperlukan sebagai penambahan modal usaha ekonomi produktif atau untuk penganekaragaman usaha, sebagai modal kegiatan Jaminan Kesetiakawanan Sosial (Jamkesos).

Dari tahapan-tahapan pengembangan bantuan stimulan di atas yang di berikan langsung oleh Dinas Sosial kepada masyarakat namun program yang dibuat oleh Dinas Sosial tersebut tidaklah berjalan dengan mulusnya karena masih banyak masalah-masalah di temukan di dalam pengelolaan dan penerapan bantuan stimulan tersebut.

Kita bisa lihat masalah-masalah apa saja yang menghambat dari keberhasilan program stimulan tersebut yang sudah pernah di terapkan antara lain sebagai berikut;

1. Didalam pembagian kerja para anggota kelompok kadang-kadang tidak adil dan merata, misalnya tempat tinggal saling berjauhan, lahan kosong yang terbatas untuk membuat kandang yang besar, dan lain-lain.
2. Kurang berpengalaman nya warga di dalam pengurusan hewan ternaknya maka jumlah kambing akan berkurang dikarenakan ada yang mati.
3. Terjadinya penjualan kambing yang di lakukan oleh kelompok sehingga tahapan pengguliran kepada kelompok lain tidak dapat di lakukan lagi.
4. Ketidakadilan atau ketidakmerataan di dalam pembagian hasil yang di peroleh antar sesama anggota di dalam kelompok tersebut.
5. Tidak adanya pengumpulan dana IKS (iuran kesetiakawanan sosial) di karenakan tidak memperoleh keuntungan dari hasil usaha tersebut.
6. Beberapa orang dari masyarakat ada juga yang tidak mau mengambil bantuan tersebut dengan alasan mereka akan merasa di bebani nantinya sehingga bisa menghambat aktivitas sehari-harinya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari permasalahan di atas program KUBE sudah pernah di terapkan namun penerapan nya belum lah berjalan dengan baiknya sesuai dengan harapan khusus nya bagi Dinas Sosial dan pada umum nya masyarakat di kecamatan itu sendiri, target yang di buat oleh Dinas Sosial belum lah tercapai dengan baik karena di dalam pengelolaan program KUBE tersebut banyak sekali di temukan faktor-faktor penghambat keberhasilan program itu sendiri sehingga hasil yang di peroleh belum lah maksimal dan masih jauh dari harapan sehingga perekonomian masyarakat belum terbantu dengan baik nya dan tingkat kemiskinan pun di kecamatan tersebut belum lah berkurang

,adapun faktor-faktor penghambat keberhasilan dari program KUBE tersebut bisa kita lihat pada permasalahan di atas,Ada juga faktor lainnya yang menghambat keberhasilan program di atas tersebut adalah proses pembangunan baik infrastruktur maupun non infrastruktur nya belum berjalan dengan baik ini sangat berpengaruh pada program yang di buat oleh Dinas sosial tersebut, Dinas Sosial tidak berhenti disitu saja dalam mengatasi kemiskinan yang ada akan tetapi Dinas Sosial selalu berupaya memantapkan program nya dan membuat program-program baru untuk mengentaskan kemiskinan yang ada.

tersebut,salah satu peran Dinas Sosial adalah sebagai lembaga yang memberdayakan masyarakat miskin agar bantuan untuk masyarakat miskin tersebut tepat pada sasaran nya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Labuhanbatu.”**

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang berhasil diwujudkan secara nyata telah menyebabkan turunnya jumlah kemiskinan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang ditempuh. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru (**UU No. 25 Tahun 2000 tentang Proenas**).

Dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu yang telah diungkapkan di atas, penulis merumuskan pokok masalah yang paling disoroti penulis pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Peran Dinas Sosial (Dinsos) dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Labuhan Batu?
2. kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh Dinas Sosial (Dinsos) dalam menanggulangi angka kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu?
3. Bagaimana Pemerintah daerah dalam melakukan renovasi rumah bagi warga yang memiliki rumah yang tidak layak huni?.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dan upaya yang dilakukan Dinas Sosial (Dinsos) dalam menanggulangi angka kemiskinan .

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai wadah dalam menerapkan ilmu yang di miliki oleh penulis dan untuk menambah pengetahuan penulis dalam menganalisa peran Dinas Sosial (Dinsos) dalam menanggulangi angka kemiskinan.
2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi instansi yang terkait dalam usaha-usahanya menanggulangi angka kemiskinan.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti persoalan yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini penulis menguraikan sistematika penulisan dalam berbagai bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam Bab ini menguraikan tentang-tentang Deskripsi Teori, Kerangka Berpikir, serta Konsep Operasional.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Dalam Bab ini meliputi Tempat dan Waktu Penelitian, Jenis dan

Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, serta Analisis Data serta Wawancara.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam Bab ini menguraikan Deskripsi Lokasi Penelitian, Deskripsi Hasil Penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang Pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peranan

Menurut **Soerjono S.** (1990 : 26), bahwa "Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial".

Salbin T.R dan **Allen V.E** (dalam Miftah Thoha, 2005 : 263) menyatakan bahwa "Suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal".

Selain daripada itu, **Soerjono Soekanto** (2000 : 122) juga menyatakan bahwa "Peranan merupakan suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku". Patokan-patokan perilaku ini didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku di dalam masyarakat setempat dan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

Peranan pemimpin juga didefinisikan oleh **E. Winardi** (2003 : 63) sebagai sesuatu yang mencakup kegiatan pemberian pengarahan dan koordinasi aktivitas-aktivitas pihak bawahannya. Hal tersebut mencakup kegiatan penempatan pegawai/karyawan (Staffing) hingga pemberian tugas-tugas.

Hasymi Ali (2002 : 431-432) mendefinisikan "Konsep peranan itu berkaitan dengan kegiatan seseorang dalam kedudukan (Position) tertentu". Ia menggambarkan perilaku yang diharapkan daripadanya jika ia menduduki suatu jabatan, baik dalam sistem masyarakat maupun dalam sistem organisasi. Sesuai

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

dengan pendapat tersebut **Freemont E. Kast** dan **James E. Rosenzweig** (Terjemahan Hasymi Ali, 2002 : 432), menegaskan bahwa "Peranan biasanya didefenisikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari setiap orang dalam kedudukan tertentu, siapapun dia. Perilaku ini tentu saja ditentukan (Ordined) oleh masyarakat. Jadi, peranan itu menentukan semacam limit atas tipe ekspresi kepribadian yang mungkin dalam situasi tertentu".

Pendapat lain yang dikemukakan oleh **Rivai Z.** (2004 : 148) yang menerangkan bahwa "Peranan diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu". Artinya, tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh Kepala Dinas Sosial (Kadisos) sebagai aparatur pelaksana penegak peraturan-peraturan dalam bidang sosial di daerah haruslah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun maksud dari defenisi-defenisi yang telah dikemukakan di atas, menyatakan bahwa Kepala Dinas Sosial (Kadisos) memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan mengantisipasi permasalahan sosial sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, maka Dinas Sosial memiliki peran yang sangat besar dalam menanggulangi angka kemiskinan yang timbul agar proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2.2 Peranan Dinas Sosial

Sebagai satuan kerja perangkat 'daerah, Dinas Sosial Kabupaten Labuhan

Batu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pemerintah Daerah. Peran atau

upaya-upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Labuhan Batu antara lain:

1. Melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Mengembangkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Memperluas ketahanan sosial masyarakat.
4. Meningkatnya profesionalisme aparatur yang berbasis kesejahteraan sosial.

Berdasarkan peran atau upaya-upaya tersebut dijabarkan kembali dalam bentuk-bentuk yang lebih spesifik, sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui kegiatan:
 - a. Pembangunan Perumahan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
 - b. Pelatihan Keterampilan, Pembentukan dan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
 - c. Bantuan Perbaikan Perumahan Fakir Miskin / Tidak Layak Huni.
2. Program Pembinaan Anak Terlantar melalui Kegiatan Pendataan Anak Terlantar.
3. Program Pembinaan Panti Asuhan melalui Kegiatan Bantuan Tambahan Biaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial melalui Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penertiban, Pembinaan dan Bimbingan Gelandangan dan Pengemis.
 - b. Bantuan Pengadaan Keterampilan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Sekolah Luar Biasa (SLB)
5. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo melalui kegiatan Pengadaan Prasarana Panti Asuhan.

2.3 Teori Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki oleh si miskin. Penduduk pada umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi serta kesejahteraannya sehingga menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan formal maupun nonformal dan membawa konsekuensi terhadap pendidikan informal yang rendah (Supriatna,

2000:196)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Defenisi kemiskinan terbagi atas tiga yaitu kemiskinan relatif, kemiskinan absolut, kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang (Sudantoko, 2009:43-46).

Pemikiran mengenai kemiskinan berubah sejalan dengan berlalunya waktu, tetapi pada dasarnya berkaitan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (Mikelsen, 2003:194). Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijoko, 1997:137).

Menurut **Sar A. Levitan** dalam Ala (1981:3) menyatakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial (2002:3-4) kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak.

Kemiskinan terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Perpres Nomor 7 Tahun 2005

tentang RPJMN). Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial yang meliputi: aset, sumber-sumber keuangan, organisasi dan jaringan sosial, pengetahuan dan informasi untuk memperoleh pekerjaan menjadikan seseorang menjadi miskin (John Friedman (1979) dalam Ridlo (2001:8).

Definisi kemiskinan dapat ditinjau dari tinjauan ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi kemiskinan adalah kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Secara sosial kemiskinan diartikan kekurangan jaringan sosial dan struktur untuk mendapatkan kesempatan meningkatkan produktivitas. Sedangkan secara politik kemiskinan diartikan kekurangan akses terhadap kekuasaan (Effendi, 1993:201-204).

Tinjauan yang sama dengan penjelasan yang berbeda dikemukakan Nugroho dan Dahuri (2004:165-166). Dari aspek ekonomi, kemiskinan merupakan kesenjangan antara lemahnya daya pembelian (positif) dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar (normatif). Dari aspek sosial, kemiskinan mengindikasikan potensi perkembangan masyarakat yang rendah. Sedangkan dari aspek politik, kemiskinan berhubungan dengan rendahnya kemandirian masyarakat.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (2003:25) memberikan definisi kemiskinan dengan basis keluarga. Keluarga yang termasuk kategori miskin adalah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository:uma.ac.id 25/8/23

Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Sedangkan Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal tetapi belum memenuhi seluruh kebutuhan sosio psikologinya seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga dan lingkungan dan transportasi.

Menurut Rusli dkk (1995:51-52) harus dibedakan antara kemiskinan, ketidakmerataan, keterisolasian dan keterbelakangan. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang atau sekelompok orang tidak dapat memenuhi standar kebutuhan minimum tertentu. Ketidakmerataan lebih menekankan pada standar hidup relatif diantara anggota masyarakat. Keterisolasian menyangkut ketidakmampuan sekelompok orang untuk berhubungan secara teratur dan mudah dengan masyarakat lainnya, sedangkan keterbelakangan menyangkut kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai kebutuhan serta kondisi kehidupan yang lebih baik.

b. Penyebab Kemiskinan

Pada umumnya indikator kemiskinan (Mudrajad Kuncoro: 142) menggunakan kriteria garis kemiskinan (Poverty line) untuk mengukur kemiskinan absolut. Salah satu kriteria Garis Kemiskinan yang digunakan adalah versi BPS (Badan Pusat Statistik).

Batas Kemiskinan pada masing-masing daerah berbeda-beda karena didasarkan pada lokasi yang berbeda dan standar kebutuhan hidup masing-masing daerah. BPS (Badan Pusat Statistik) membatasi yang dikatakan miskin dari segi

besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994). Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedangkan pengeluaran minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang serta aneka barang dan jasa.

BPS menggunakan dua pendekatan dalam menentukan garis kemiskinan tersebut, yaitu Pendekatan Kebutuhan Dasar (Basic Needs Approach) dan Pendekatan Head Count Index. Pendekatan Pertama, merupakan pendekatan yang melandaskan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan pendekatan kedua, menggunakan ukuran kemiskinan absolut, dimana Jumlah penduduk yang berada dibawah suatu batas garis kemiskinan yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Artinya, komponen garis kemiskinan terdiri dari 2 (dua) Komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (Food Line) dan garis kemiskinan non makanan (Nonfood Line).

Penyebab kemiskinan dapat terjadi karena kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi kultural (budaya). Kemiskinan alamiah dan ekonomi timbul akibat keterbatasan sumber daya alam, manusia, dan sumber daya lain sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan hasil pembangunan yang belum merata, tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan. Sedangkan kemiskinan kultural (budaya) disebabkan sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan sehingga menjebak seseorang dalam kemiskinan

(Nugroho dan Dahuri, 2004:167-168; Soegijoko, 1997:137; dan Nasution, 1996: 48-50).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proppenas menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang disebabkan: (1) sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif; (2) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian; dan (3) rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat, dan kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang disebabkan (1) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (2) perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (3) bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Sedangkan Sharp et. al. dalam Kuncoro (2004:157) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Kedua, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan produktivitas dan upah yang rendah.

Batas Kemiskinan juga dijabarkan oleh pakar lainnya bahwa :

"Dalam konteks pembangunan yang berpusat pada manusia, aspek relativitas ini penting karena menunjukkan pola hubungan struktural antara wilayah atau komunitas. Sebagaimana diketahui, pembangunan yang berpusat pada manusia mendasarkan dari pada teori penanggulangan kemiskinan struktural (bukan kemiskinan absolut) (Sajogyo, 2006). Kalaupun menggunakan suatu garis

penanda kemiskinan atau ketertinggalan wilayah, argumennya tetap diarahkan pada pengurangan kesenjangan antar manusia, kelompok, komunitas dan wilayah. Dengan demikian dimungkinkan suatu proses pemberdayaan, berupa penanggulangan resiko komunitas dengan cara menambah tenaga/kapasitas bagi lapisan tertinggal untuk menembus struktur menuju lapisan yang lebih maju.

Ada banyak penjelasan mengenai penyebab Kemiskinan. (Sharp Mudrajad Kuncoro, 2004: 157), di dalam mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro: kemiskinan muncul akibat dari adanya perbedaan pola pemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak seimbang. Kedua, timbulnya kemiskinan akibat dari adanya perbedaan Kualitas Sumber Daya Manusia. Perbedaan SDM tersebut antara lain dari Sisi Pendidikan yang rendah, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan. Dan yang Ketiga, munculnya kemiskinan akibat dari perbedaan akses dalam modal.

c. Jenis Kemiskinan

Pembagian jenis kemiskinan dapat dibagi berdasarkan pola waktu. Menurut Ginandjar Kartasmita dalam Ridlo (2001:11), menurut pola waktu tersebut kemiskinan dapat dibagi menjadi: (1) *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun yang diantaranya merupakan daerah kritis sumber daya alam atau terisolasi. (2) *Cyclical poverty* yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. (3) *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti sering dijumpai kasus-kasus nelayan dan petani tanaman pangan. (4) *Accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena

bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Berdasarkan jenisnya kemiskinan secara umum dapat dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan absolut yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang antara lain terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat tersebut. Meskipun seseorang/masyarakat telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak (tidak miskin), tetapi masih rendah kualitasnya dibandingkan masyarakat sekitarnya yang relatif lebih kaya (Soegijoko, 1997:138; dan Esmara (1986) dalam Ridlo (2001:10) Kemiskinan absolut keberadaannya masih dapat dihilangkan (*poverty alleviation*), sedangkan kemiskinan relatif keberadaannya tidak dapat dihilangkan, tetapi hanya dapat dikurangi intensitasnya (*poverty reduction*) (Soegijoko, 1997:138).

Berdasarkan uraian tersebut, kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang terus menerus berkembang dan perlu diatasi oleh berbagai lapisan baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri.

2.4 Perda Kabupaten Labuhan Batu tentang penanggulangan angka kemiskinan

Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Labuhan Batu merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan guna memecahkan masalah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD setempat, dengan mengutamakan kewenangan wajib sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah memberikan kewenangan otonomi kepada setiap daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam undang-undang ini, daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan persoalan-persoalan pembiayaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan sesuai dengan standar, norma dan kebijakan Pemerintah kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal serta agama. Daerah juga mendapat kewenangan untuk menyelenggarakan perizinan usaha baik bagi investor dalam negeri maupun investor asing serta dapat pula melakukan pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri.

Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2016, Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, koperasi, dan tenaga kerja dengan tujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan peran serta masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 78 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ditegaskan bahwa seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas

pemerintahan tersebut dibiayai dan atas beban APBD. Hal ini berarti bahwa setiap daerah Kabupaten dan kota harus mampu menggali sumber keuangan sendiri secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, yang didukung oleh perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Di lain pihak, seluruh lapisan masyarakat yang ada di daerah berharap kondisi kehidupan mereka menjadi lebih baik, seiring dengan diberlakukannya Undang-undang yang mengatur tentang Otonomi Daerah. Oleh karena itu setiap penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan daerah harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, karena pada dasarnya pembangunan dilaksanakan dari, oleh dan untuk seluruh masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Dengan kata lain bahwa masyarakat harus diberdayakan melalui peran aktifnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan pembangunan di daerah.

Bagi Kabupaten Labuhan Batu sebagai Kabupaten yang baru selain menghadapi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tersebut, maka permasalahan obyektif dalam mengagendakan program dan kegiatan pembangunan daerah adalah kondisi geografis dan keadaan alam yang spesifik, yang belum seluruhnya tersentuh oleh kegiatan pembangunan masa sebelumnya.

2.5 Konsep Operasional

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka penulis menguraikan beberapa konsep operasional sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Sosial (Dinsos) yang dimaksud disini adalah "serangkaian

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)25/8/23

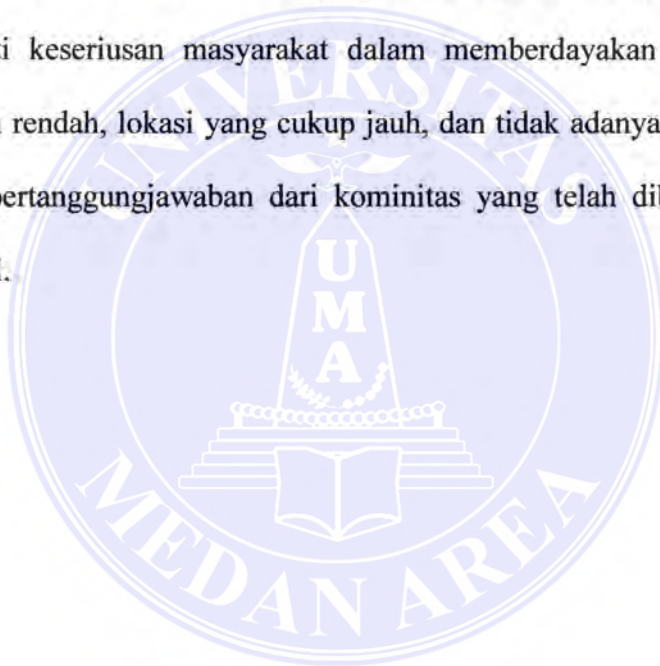
upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Labuhan Batu untuk menanggulangi angka kemiskinan yang timbul didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Labuhan Batu Nomor 05 tahun 2016, tentang Fungsi Dinas Sosial (Dinsos) tingkat II Kabupaten Labuhan Batu .

2. Upaya-upaya adalah suatu usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan dengan membuat program untuk pemberdayaan masyarakat miskin.

Upaya Dinas Sosial dalam menanggulangi angka kemiskinan dapat di ukur yaitu:

- a. Melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - b. Memperluas ketahanan sosial masyarakat.
 - c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
 - d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang berbasis kesejahteraan sosial.
3. Penanggulangan angka kemiskinan yaitu langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk mengurangi angka kemiskinan dan mensejahterahkan masyarakat miskin.
 4. Miskin adalah ketidak mampuan masyarakat dari segi materi, sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya susah.
 5. Masyarakat miskin yaitu masyarakat yang tidak memiliki rumah yang layak huni dan penghasilan yang tidak memenuhi kebutuhan hidupnya.

6. Rumah layak huni yaitu rumah yang jauh dari kelayakan untuk di huni atau rumah yang semi permanen
7. Bantuan dalam penelitian ini yaitu bantuan dari pemerintah terhadap masyarakat miskin untuk perbaikan rumah dan bantuan lain untuk menunjang ekonomi masyarakat miskin.
8. Kendala-kendala yaitu hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam merealisasikan program kesejahteraan masyarakat miskin, seperti keseriusan masyarakat dalam memberdayakan komunitas yang masih rendah, lokasi yang cukup jauh, dan tidak adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dari komunitas yang telah dibantu oleh Dinas Sosial.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Di Kantor Dinas Sosial tentang peran dinas sosial terhadap penanggulangan angka kemiskinan di Kabupaten Labuhan Batu yang dilaksanakan pada bulan february sampai dengan bulan Maret 2020.

3.2 Data Yang Diperlukan

Data yang diperlukan dan berhasil peneliti kumpulkan antara lain :

a. Data Primer, yaitu:

Data yang diperoleh langsung dari responden mengenai usaha-usaha atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Labuhan Batu dalam menaggulangi angka kemiskinan yang timbul di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatra Utara beserta tanggapan masyarakat Kabupaten Labuhan Batu terhadap peranan atau upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Labuhan Batu .

b. Data Sekunder, yaitu:

Data mengenai gambaran umum Jumlah Pegawai Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Labuhan Batu , serta Tugas dan Fungsi Pegawai Dinas Sosial (DINSOS) Kabupaten Labuhan Batu . Sedangkan data lainnya berupa Jumlah Penduduk Kabupaten Labuhan Batu dan angka kemiskinan yang timbul pada tahun 2020.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan guna memperoleh informasi dalam penelitian ini diantaranya meliputi : Dokumentasi, Wawancara (Indept Interview), dan Observasi.

1 . Dokumentasi

Menurut Sugiono (2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai sumber yang terkait antara lain pada lingkungan Dinas Sosial. Disamping dokumentasi yang terdapat pada dinas tersebut juga dilakukan pengambilan data dokumen selama 2 bulan mengenai pelaksanaan bedah Rumah.

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Sugiono, 2013). Wawancara dilakukan terhadap informan pada lingkungan Dinas Sosial yang disesuaikan dengan jumlah sampel yang dibutuhkan. Dengan cara ini dapat diperoleh masukan-masukan untuk memperdalam kajian mengenai hambatan dan masalah serta preferensi kinerja Aparat birokrasi. Panduan wawancara digunakan sebagai alat dalam melakukan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsistensi hasil pendataan.

3. Observasi

Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

4. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, prediket yang

diberikan tersebut dalam bentuk peringkat berdasarkan yang diinginkan. Agar pemberian prediket dalam penelitian ini tepat maka sebelum dilakukan pemberian prediket, indikator-indikator penelitian diukur dengan persentase dan frekuensi yang diolah kedalam tabel serta diberi pembahasan-pembahasannya.



BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Profil Kabupaten Labuhan Batu

4.1.1. Sejarah Singkat Kabupaten Labuhanbatu

Kabupaten labuhanbatu, pada zaman sebelum penjajahan Belanda terdiri dari empat Kerajaan atau Kesultanan yang Pemerintahannya dipimpin oleh Raja atau Sultan. Kerajaan atau kesultanan tersebut, yaitu : Kesultanan Kualuh berkedudukan di Tanjung Pasir, kesultanan Bilah di Negeri Lama, Kesultanan Panai di Labuhan Bilik dan Kesultanan Kota Pinang di Kota Pinang. Di antara empat Kerajaan itu, Kesultanan Kota Pinang, Bilah dan Pane berasal dari satu keturunan di Pagar Ruyung (Minangkabau), sedangkan Kesultanan Kualuh berasal dari Asahan.

Pada Tahun 1862, kesatuan Belanda berada di bawah Bevel Hebbber masuk ke Labuhanbatu melalui Sungai Barumon, di sebelah hulu kota Labuhan Bilik sekarang dan membuat pendaratan dari beton atau batu. Pendaratan Belanda itu berkembang menjadi pelabuhan dan berkembang menjadi Pelabuhan Batu, yang sering di ucapkan menjadi Labuhanbatu sekarang. Pada tanggal 13 Maret 1945, pasukan ke 25 Jepang dibawah komando jendral Tomoyuki Yamasihuta menyerbu Sumatera Utara dan bergerak menuju Rantauprapat yang merupakan pusat Pemerintah Belanda di Labuhanbatu.

Setelah kekalahan Jepang terhadap tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 yang memberikan momentum kepada bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka di

Sumatera Utara dibentuklah Nasional Daerah di berbagai daerah termasuk di Labuhanbatu. Melalui keputusan Komite Nasional Daerah Labuhanbatu pada tanggal 17 Oktober 1945 dibentuklah pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu. Dalam perkembangan berikutnya, Komite Nasional Daerah Keresidenan Sumatera Timur menetapkan Labuhanbatu sebagai salah satu Kabupaten di Sumatera Utara, dipimpin Gose Gautama sebagai Bupati pertama, yang membawahi empat kewedanaan yaitu kewedanaan yaitu kewedanaan Kualuh Leidong, Kewedanaan Kota Pinang, Kewedanaan Bilah, Kewedanaan Panai. Berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TK II kabupaten Labuhanbatu Nomor 08 tahun 1998, bahwa tanggal 17 oktober ditetapkan sebagai hari jadi Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran daerah Kabupaten Daerah TK II Labuhanbatu Nomor 11 tahun 1998 seri D nomor 4). Seiring dengan perkembangan Daerah Otonomi baru di era reformasi, melalui UU nomor 32 dan UU nomor 33 tahun 2008, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

4.1.2. Letak dan Batas Wilayah Kabupaten Labuhan batu

Pada mulanya luas Kabupaten Labuhanbatu 9.223,18 Km² , sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 1.431.605 jiwa pada tahun 2019. Dengan dibentuknya Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka luas Kabupaten ini menjadi 2.562,01 km² dan penduduknya sebanyak 857.692 jiwa pada tahun 2019. Selatan di sebelah selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara di sebelah Utara di sebelah Barat, dan Provinsi Riau di sebelah Timur.

4.1.3. VISI DAN MISI KABUPATEN LABUHAN BATU

Visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu tahun 2016 – 2021 “SATU TEKAD BERSAMA RAKYAT MENUJU SEJAHTERA 2020, LABUHANBATU SEMAKIN HEBAT, LEBIH BERDAYA 2025 “ dan untuk perwujudannya telah dituangkan dalam peraturan Daerah kabupaten Labuhanbatu Nomor 4 tahun 2016, tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Visi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dijabarkan melalui misi antara lain:

1. Menyelenggarakan Pemerintah yang tanggap dan peduli untuk melayani masyarakat serta membantu aparat hukum dalam memberantas Korupsi Kolusi Nepotisme, mencegah tindak kriminal dan menegakkan HAM secara profesional, berdedikasi, berwibawa.
2. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang mampu menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempunyai integritas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa dengan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci untuk keberhasilan pelaksanaan program yang mandiri guna membentuk karakter masyarakat Labuhanbatu yang mempunyai ciri ramah, santun dan beretika.
3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjamin/ asuransi, terjangkau, merata dan berkeadilan sesuai dengan standart Internasional.
4. Membangun perekonomian yang kuat untuk menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan kerja,

- peningkatan kualitas produksi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, penguatan lembaga keuangan dan koperasi serta pengembangan potensi wawasan wisata.
5. Menciptakan sinergitas pembangunan dibidang infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas.
 6. Perwujudan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu akan dilaksanakan oleh berbagai organisasi/ lembaga dan pemangku kepentingan lainnya antara lain oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Labuhanbatu.
 7. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten Labuhanbatu telah terbentuk sebagaimana ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Kabupaten Labuhanbatu, yang salah satunya adalah OPD Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu dengan urusan wajib dengan pelayanan dasar di Kabupaten Labuhanbatu.

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN LABUHANBATU UNTUK MEWUJUDKAN
VISI DAN MISI PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU.

1. Visi

Visi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu adalah : “TERWUJUDNYA MASYARAKAT SEJAHTERA BEBAS DARI PERMASALAHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN LABUHAN BATU”.

Makna yang terkandung pada visi tersebut adalah sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)25/8/23

Terwujud : Terlaksana, Terbukti

Sejahtera : Bahwa kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir dan batin berupa kecukupan pangan.

Perwujudan Visi dilaksanakan melalui Misi. Misi menggambarkan kehendak organisasi serta merupakan pondasi. Untuk mendukung Visi tersebut diatas dengan mendalami pilar – pilar, fungsi sosial Pemerintah kabupaten Labuhanbatu.

2. Misi

Misi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

- Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS
- Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan terhadap perberdayaan, bagi PKMS.
- Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial secara kompetitif.

Adapun fikiran yang terkandung dalam misi tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS maksudnya keberhasilan pembangunan perlindungan dan jaminan sosial di tentukan dengan meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial dan pemberdayaan sosial.

- b. Meningkatkan peran serta/ partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat.
- c. Pemberdayaan dan pembinaan mengandung pengertian pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan usaha bagi keluarga miskin.
- d. Peningkatan rehabilitasi sosial mengandung makna pemulihan fungsi sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (Gelandangan, tuna susila, korban Narkotika, HIV/Aids.
- e. Meningkatkan pelayanan sosial dan melestarikan nilai kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial yaitu optimisasi pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan Sosial melalui penanganan dalam panti maupun luar panti, bantuan bagikorban bencana dan melestarikan nilai nilai kepahlawanan, keperintisan dan setiakawanan sosial. Adanya kerja sama, kepedulian, kesejahteraan dan jaringan kerja sistem informasi masalah sosial serta adanya prakarsa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

1. Sasaran Kerja :

Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu memiliki sasaran yang akan dicapai antara lain :

- Meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Terlayani, terlindungi, dan tersantuninya PMKS dalam pemenuhan kebutuhannya
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan partisipasi sosial

- Tercapainya kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang cacat
- Tersedianya tempat penampungan dan pembinaan bagi penyandang PMKS
- Meningkatkan partisipasi sosial

2. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumus strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yg selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arsitektur perencanaan pembanguna dipisahkan menjadi dua :

- Perencanaan strategik yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daera.
- Perencanaan operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.
- Dari hasil pengamatan dapat dirumuskan perencanaan strategik yang akan diambil antara lain :
- Bekerja dengan pendekatan khalayak sasaran yaitumengurangi permasalahan sosial dengan memberikan playanan sosial bagi penyandang maslah kesejahteraan sosial (PMKS) sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup PMKS sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup PMKS dengan mengarahkan arah kebijakan program kegiatan, meningkatkan keterampilan, meningkatkan rehabilitasi sosial, peningkatan kualitas dan pengelolaan, meningkatkan kuantitas bantuan/ jaminan sosial.

- Memberdayakan khalayak untuk memasarkan program pembangunan kesejahteraan sosial serta menjalin kemitraan dan meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PMKS) dalam penanganan PMKS.

3. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2016 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dengan uaian jabatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas membawahi Sekretaris dan 5 kepala bidang
2. Sekretaris membawahi 3 kasubbag
3. Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi 3 seksi
4. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi 3 seksi
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi 3 seksi
6. Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi 3 seksi

4. Dasar Hukum Dalam Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Antara Lain :

1. Uu No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Uu No 40 Tahun 2004 Tentang Penanggulangan Bencana.
3. Uu No 40 Tahun 2004 Tentang Kesejahteraan Sosial.
4. Uu No 40 Tahun 2004 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
5. Uu No 40 Tahun 2004 Tentang Pangan.
6. Uu No 40 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
7. Pp No 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

8. Pp No 82 Tahun 2016 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
9. Pp No 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
10. Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
11. Peraturan Presiden No 166 Tahun 2014 Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan.
12. Permensos No 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Dan Pengelolaan Data Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks)
13. Permensos No 10 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin
14. Permensos No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
15. Permensos No 11 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
16. Permensos No 28 Tahun 2018 Tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial.
17. Permensos No 9 Tahun 2018 Tentang Standart Teknis Pelayanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Sosial Didaerah Provinsi Dan Didaerah Kabupaten/ Kota.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Dinas Sosial dalam Mengatasi masyarakat miskin di Kabupaten Labuhan Batu . Pada bab ini diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk hasil penelitian yang dianggap sebagai masukan bagi semua kalangan sehingga bermanfaat pada penulisan selanjutnya.

6.1. Kesimpulan

1. Peran pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu dalam hal ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dalam pemberdayaan masyarakat miskin Kabupaten Labuhan Batu meliputi, perencanaan, pendataan, dan pemberian bantuan. Pelaksanaan perencanaan, terhadap masyarakat miskin terlihat belum maksimal karena kurang terjalin koordinasi yang baik antar pemerintah daerah. Dalam proses pendataan masyarakat miskin khususnya pendataan penerima bantuan beras miskin (Raskin) tidak profesional, jumlah penerima bantuan raskin dari tahun 2016 hingga 2019 tidak mengalami perubahan (data tetap). Dalam pemberian bantuan, terlihat baik dan maksimal. Bantuan untuk masyarakat miskin secara keseluruhan 9 Kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu sudah mendapatkan bantuan.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Labuhan Batu terbagi menjadi dua yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung yakni ketersediaan anggaran

untuk pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Labuhan Batu ditopang oleh anggaran dari Pemerintah pusat yang diatur dalam APBN. Hal ini sangat membantu Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat miskin di Kabupaten Labuhan Batu . Mengingat pemberdayaan miskin merupakan prioritas utama dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat yakni pendataan tidak profesional, proses pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Labuhan Batu , proses pendataan bantuan beras miskin yang tidak tepat sasaran, karena masih banyaknya masyarakat yang lebih layak mendapatkan bantuan tersebut malah tidak menerima bantuan justru yang mampu atau tidak layak mendapatkan bantuan malah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

6.2. Saran

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Labuhan Batu dalam pemberdayaan masyarakat miskin seyogyanya lebih intens koordinasi dengan dinas-dinas terkait, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang dibuat.
2. Dalam proses pendataan masyarakat miskin khususnya pendataan penerima bantuan beras miskin harus dilakukan perbaharuan data setiap tahunnya sehingga dapat diketahui masyarakat yang sudah tidak berhak lagi mendapatkan bantuan atau masyarakat yang sudah tidak bersyarat lagi digolongkan masyarakat miskin. Disamping itu dalam pelaksanaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA masyarakat miskin harus lebih di perhatikan masyarakat yang

lebih layak mendapatkan bantuan, sehingga bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Pemerintahan Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, Faried. 1996. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ambar, Teguh Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ari Kunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 1989. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Efendi, Tadjuddin Noer. 1993. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Hartono. 2006. *Statistik Untuk Penelitian. Cet. 3. Lembaga Studi Filsafat Kemasyarakatan, Kependidikan dan Perempuan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Istianto, Bambang. 2009. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kansil, Christine. 2014. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kontur, Roni. 2002. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. PPM: Jakarta.
- Kuncoro, Drajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga: Jakarta.
- Muslim, Azis. 2009. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Teras.
- Noor, Arifin. 2007. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung : CV. Pustaka Setia. Sunggono, Bambang. "Hukum dan Kebijakan Publik". Sinar Grafika, Jakarta 1994.
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

- Santosa Pandji. (2008). *Administrasi Publik (Teori Dan Aplikasi Good Governance)*. Penerbitan oleh: PT Refika Aditama, Bandung.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan ang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah: Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Soegijoko, 2001. *Kemiskinan dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Yayasan Soegikoko: Bandung.
- Soejito, Irawan. 1984. *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2103. *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarno, Siswanto.2014. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Syafiie, Inu Kencana.2013.*Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafiie, Inu Kencana.2013. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung: Mandar Maju.
- Zubaedi. 2007. *Wacana Pengembangan Alternatif. Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta:Ar- Ruzz Media.